

Adaptasi Dan Adopsi Masyarakat Terhadap Pendidikan Modern

W
H.A.R Tilaar

How should education respond to globalization? Globalization is the process of change. Global culture means modernity stressing on rationality. The process of globalization is a network system integrating global livelihood in time-space compression. It is comprised of economic, politic and cultural globalization. The relationship between globalization and education can be seen with the establishment of the knowledge-based society.

The element of modernity in the process of globalization needs to be adapted through education integrating local values. Therefore education should be adapted with global values especially in creating innovative and intelligent individuals in the knowledge-based society. Indonesian society will be as competitive as other global society if they are well trained and intelligently equipped with English and computer languages as required in the process of globalization.

Pendahuluan

Implisit di dalam proses globalisasi adalah perubahan. Perubahan terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Apabila kebudayaan secara umum merupakan suatu rangkaian kepercayaan, nilai-nilai, dan gaya hidup dari suatu masyarakat tertentu di dalam eksistensi kehidupan sehari-hari,¹ maka dewasa ini di dalam era globalisasi mulai muncul apa yang disebut kebudayaan global. Apakah yang disebut dengan kebudayaan global? Kita setuju atau tidak, kebudayaan global seperti yang dikenal dewasa ini mempunyai warna yang kental Amerika, baik di dalam asal-mulanya maupun isinya. Bahkan seorang sejarawan Amerika Selatan, Claudio Valiz mengatakan bahwa kebudayaan global merupakan suatu "the Hellenic phase of Anglo-American civilization."²

Apakah ciri utama dari kebudayaan global itu? Di dalam satu kata, kebudayaan global berarti *modernitas*. Apakah arti modernitas? Di dalam pengertian ini termasuk masyarakat modern, pendidikan modern, ekonomi modern, gaya hidup modern, budaya modern. Isi dari pengertian modern ternyata berjenis-jenis. Namun demikian istilah modern ternyata telah lahir dari pemikiran kebudayaan Barat. Enrique Dussel³ menguraikan perkembangan pengertian modernitas sebagai berikut. Konsep modernitas muncul pada masa Aufklärung dalam kebudayaan Barat yang menitikberatkan kepada rasionalitas. Aufklärung yang lahir pada abad

1 Peter L. Berger, "The Cultural Dynamics of Globalization" dalam Peter L. Berger & Samuel P. Huntington, *Many Globalizations*, hlm. 2.

2 Ibid, hlm. 3.

3 Enrique Dussel, "Beyond Eurocentrism: The World-System and the Limits Modernity," dalam Jameson & Miyoshi, *The Cultures of Globalization*, hlm. 3-31.

ke-15 tumbuh dari masyarakat Eropa atau dengan kata lain lahir dari kebudayaan Eropa. Tidak mengherankan apabila konsep modernitas tersebut berpusat kepada kebudayaan Eropa (Eropasentrisme). Pada abad ke-20 konsep modernitas ini kemudian diperluas dengan budaya Amerindia. Inilah konsep modernitas yang melingkupi seluruh planet bumi (planetary paradigm). Tidak mengherankan apabila modernitas mempunyai konotasi westernisasi.

Konsep modernitas ternyata perlu kita simak secara saksama. Tidak mengherankan terdapat banyak resistensi terhadap konsep modernisasi yang digandeng oleh proses globalisasi dewasa ini. Menurut Noam Chomsky⁴ konsep modernisasi yang berumur 500 tahun lebih itu telah menghasilkan tiga ketimpangan: 1) Kerusakan ekologis karena dieksploitasi untuk motif mencari keuntungan dan memupuk kapital dari kekuasaan Barat (kolonialisme). 2) Kerusakan dari kemanusiaan itu sendiri karena manusia dianggap sebagai sekadar alat produksi. Terjadi eksploitasi manusia untuk memupuk kekayaan. 3) Kemiskinan akibat eksploitasi kapitalisme Barat. Lahirlah negara-negara berkembang eks kolonialisme yang miskin.

Berdasarkan analisa di atas, maka perlu kita simak apa yang dimaksudkan dengan pendidikan modern dalam era globalisasi. Apakah pendidikan modern merupakan duplikat dari pendidikan Barat dalam menghadapi perubahan-perubahan di dalam masyarakat akibat globalisasi? Ataupun pendidikan modern merupakan adaptasi dari nilai-nilai global untuk memenuhi kebutuhan lokal? Ataupun pendidikan modern merupakan adopsi dan adaptasi terhadap kekuatan global yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal?

I. Proses Globalisasi

Pertama-tama marilah kita lihat hakekat dari proses globalisasi. Proses globalisasi merupakan suatu rangkaian proses yang menginteraksikan kehidupan global di dalam suatu ruang dan waktu yang terpadatkan (*space-time compression*) melalui internasionalisasi perdagangan, internasionalisasi pasar dari produksi dan keuangan, internasionalisasi dari komoditas budaya yang ditopang oleh jaringan sistem telekomunikasi global yang semakin canggih dan cepat (Gibson & Graham).³ Kita lihat inti dari proses globalisasi ialah terciptanya suatu jaringan kehidupan yang semakin terintegrasi. Menurut Waters (1995) proses globalisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan dapat dikategorisasikan di dalam tiga bidang yaitu 1) globalisasi ekonomi, 2) globalisasi politik, 3) globalisasi kebudayaan.⁴ Di dalam bidang ekonomi kita lihat terciptanya pasar global maupun kerjasama regional. Terjadi perdagangan dalam pasar bebas yang mempunyai implikasi di dalam migrasi pekerja-pekerja khususnya pekerja intelektual. Lahirnya *multi national corporations* serta lahirnya pusat-pusat perdagangan di banyak penjuru dunia. Dalam bidang politik lahirnya gerakan demokrasi yang menuntut kebebasan warga sebagai warga dunia dan warga negaranya sendiri. Berkaitan dengan globalisasi politik, lahirnya gerakan masyarakat madani yang menuntut kemerdekaan, keamanan, keadilan

⁴ Ibid, hlm. 19.

³ Lihat Samuel Stromquist & Monkman, *Globalization and Education*, hlm. 4.

⁴ Malcolm Waters, *Globalization*, Routledge, London, 1995.

sosial serta kebutuhan untuk diakui baik dalam politik maupun di dalam hak-hak asasi manusia. Demikian pula di dalam bidang kebudayaan lahirilah gerakan pengakuan akan keragaman budaya serta pengakuan terhadap eksistensi budaya yang beragam (multikultural).

Resistensi Terhadap Budaya Global?

Di berbagai penjuru dunia tampak adanya berbagai perlawanan terhadap arus globalisasi. Namun demikian seperti yang diungkapkan oleh Stiglitz,⁷ arus globalisasi tidak dapat kita tahan. Yang dapat kita perbuat adalah mengarahkan kekuatan "tsunami" globalisasi tersebut. Coba kita lihat bagaimana peranan budaya populer (*popular culture*) pada generasi muda di seluruh dunia. Mereka dengan cepat mengadopsi budaya Adidas, McDonald's sebagai makanan cepat santap, Disney dalam bidang hiburan, MTV, *American Idol*, yang menyebarkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat global. Di dalam menghadapi arus yang sangat kuat tersebut banyak negara "menghalanginya" dengan gerakan lokalisasi yang disebut hibridisasi budaya global. Banyak contoh kita lihat proses hibridisasi tersebut atas menu McDonald sehingga diterima di berbagai tempat di dunia menurut selera masing-masing masyarakat. Proses hibridisasi bahkan dapat memberikan nilai yang positif seperti mobil keluaran Jepang terkenal dengan mutunya yang baik bahkan "quality control" dalam dunia industri sebagai penemuan budaya industri Barat yang dibesarkan dalam dunia industri Jepang kemudian diekspor kembali dalam pendekatan industrialisasi di negara-negara Barat. Di dalam hal ini beberapa negara seperti Cina melaksanakan apa yang disebut "managed globalization" atau di Afrika Selatan melahirkan kembali apa yang disebut "African Renaissance" di dalam melokalisasi nilai-nilai global. Di dalam proses globalisasi ini terjadi apa yang disebut "universalization of particularism and particularization of universalism." Inilah yang disebut "globalization-localizing dynamics" yang telah melahirkan budaya *hybrid* atau terjadi artikulasi terhadap perjumpaan di antara budaya global dan budaya lokal. Di dalam hal ini tidak terjadi sejenis resistensi terhadap nilai-nilai budaya global.⁸

Apakah dengan adanya proses globalisasi tidak mengganggu kestabilan suatu komunitas? Pertanyaan ini menarik Zygmunt Bauman⁹ yang menyetengahkan mengenai pengertian komunitas yang merasa terganggu dengan adanya proses globalisasi tersebut. Menurut Bauman di dalam suatu komunitas terdapat polarisasi antara kemerdekaan (*freedom, right to be oneself*) dan rasa aman (*security*). Proses globalisasi dapat mengganggu kemerdekaan seseorang dan oleh sebab itu seseorang menjadi tidak merasa aman. Bagaimana mengembalikan rasa aman dari ketercabutan suatu komunitas akibat globalisasi? Dalam hal ini Alain Touraine mengemukakan pentingnya mengembangkan *multikomunitarianisme*¹⁰ di dalam suatu komunitas. Paham multikomunitarianisme merupakan rasa bersatu dan setia oleh karena kepemilikan bersama (*common belonging*) dari suatu komunitas. Hal ini lebih mantap dibandingkan dengan multikulturalisme yang menekankan kepada hak pilih untuk

⁷ Lihat Joseph E. Stiglitz, *Globalization and its Discontents* (2002).

⁸ Lihat Xiaoping Li dalam Jameson & Miyoshi, *op cit*, hlm. 375.

⁹ Zygmunt Bauman, *Community*, hlm. 21-38. "Rerooting the Uprooted."

¹⁰ *Ibid*, hlm. 108.

cara hidup sendiri dari kebudayaannya. Jadi di dalam multikulturalisme yang pokok adalah kemerdekaan untuk memilih dalam kebudayaan sedangkan di dalam multikomunitarianisme yang dipentingkan ialah kepemilikan bersama di dalam suatu komunitas. Rasa kepemilikan bersama di dalam suatu komunitas menurut Jürgen Habermas dapat dijamin di dalam suatu negara demokratis konstitusional. Pendapat ini merupakan pelengkap dari pendapat multikulturalisme Charles Taylor yang menekankan kepada "right to recognition."¹¹

Globalisasi, Individualisasi, Negara-bangsa (*nation-state*)

Ada anggapan globalisasi akan menghilangkan konsep negara-bangsa seperti yang dituturkan oleh Kenichi Ohmae. Sepintas kelihatannya demikian, namun dapat kita lihat justru globalisasi mengungkit kembali rasa kesatuan di dalam suatu komunitas dengan kebudayaannya yang khas. "The Need of Recognition" ternyata merupakan suatu kebutuhan manusia di dalam kelompoknya. Seperti yang telah diuraikan di atas terjadi dinamika globalisasi-lokalisasi yang melahirkan suatu bentuk budaya baru yang disebut budaya hybrid. Budaya hybrid mempunyai nilainya tersendiri karena hal tersebut merupakan inovasi baru di dalam suatu komunitas. Selama penemuan baru itu merupakan milik bersama maka hal tersebut akan menjadikan tali pengikat dari komunitas tersebut dan dengan demikian merupakan bagian yang terintegrasi di dalam kebudayaannya. Dengan demikian antara globalisasi dan etnisiti yang melahirkan rasa keterikatan di dalam kelompok beserta kebudayaannya merupakan suatu dinamika baru di dalam masyarakat dalam era globalisasi dewasa ini.

Globalisasi, *Knowledge-based Society*, Pendidikan

Kaitan antara globalisasi dan pendidikan menurut Giddens terletak di dalam lahirnya suatu masyarakat baru yaitu "*knowledge-based society*" yang merupakan anak kandung dari proses globalisasi.¹² Karena globalisasi, ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat yang merupakan dasar dari globalisasi ekonomi dan politik di dunia ini. Namun demikian suatu "*knowledge-based society*" yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan akan terus-menerus berubah dan merupakan subyek untuk revisi. Hal tersebut dapat memberikan rasa keragu-raguan di dalam kehidupan manusia. Hal ini memerlukan apa yang disebutnya sikap refleksif dari manusia yaitu kemampuan untuk merenungkan mengenai kehidupannya berdasarkan rasio. Giddens cs. berbicara mengenai modemitas refleksif¹³ yang perlu ditegakkan di dalam kehidupan masa depan. Kebimbangan yang dikemukakan Giddens sebenarnya tidak perlu karena bukankah ilmu pengetahuan justru memberikan rasa kepastian, meskipun kepastian sementara, bagi manusia? Oleh sebab itu yang diperlukan di dalam masyarakat modern adalah suatu sistem manajemen ilmu pengetahuan (*knowledge management system*) seperti yang dikemukakan oleh Bank Dunia.¹⁴ Hal ini perlu karena ilmu pengetahuan yang tidak terkendalikan dapat

¹¹ Lihat uraian tentang multikulturalisme Charles Taylor, dalam H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme*, hlm. 78-82.

¹² Stormquist & Monkman, *op cit*, hlm. 11.

¹³ Lihat: Ulrich Beck, Anthony Giddens, Scott Lash, *Reflexive Modernization* (1994).

menghancurkan kehidupan umat manusia seperti di dalam perlombaan "weapon of mass destruction (WMD)." Di sini kita lihat pentingnya pendidikan di dalam mewujudkan masyarakat masa depan yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Melalui pendidikan proses transmisi serta pengembangan ilmu pengetahuan akan terjadi. Dalam bidang kurikulum kita lihat perubahan kurikulum dari "child centered" ke arah "economy centered."

II. Mengapa Pendidikan Perlu Transformasi Menghadapi Perubahan Global?

Di dalam pendahuluan kita ditantang oleh pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai pendidikan modern di Indonesia. Di dalam uraian di atas terlihat bahwa kita tidak perlu menghadang arus globalisasi atau pun mengikuti secara membuta perubahan-perubahan global. Demikian pula kita lihat lahirnya budaya global bukan berarti hilangnya identitas suatu masyarakat; malahan globalisasi telah merangsang kesadaran individu, kesadaran etnis dari suatu komunitas yang pluralistik. Singkatnya pendidikan nasional kita perlu mempunyai sikap di dalam menghadapi perubahan-perubahan global dalam era globalisasi dewasa ini. Dengan kata lain pendidikan nasional kita perlu ditransformasikan agar dapat menjawab tuntutan-tuntutan baru di dalam perubahan global dewasa ini. Jika tidak maka kita akan tersisih dari kehidupan bersama yang semakin lama semakin intens. Demikian pula telah diuraikan bahwa proses globalisasi tidak akan menghapuskan konsep negara-bangsa, justru dapat memperkuat rasa solidaritas dari komunitas yang bernama Indonesia. Rasa kebersamaan, rasa terikat kepada suatu kelompok yaitu bangsa Indonesia, merupakan modal sosial (*social capital*)¹⁴ yang ternyata sangat besar peranannya dilahirkan, dipupuk, dan dikembangkan di dalam lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Pendidikan modern kita dewasa ini perlu mengamati, memilah-milah, memilih, nilai-nilai global yang mana saja yang dapat diadaptasikan dalam pendidikan nasional kita. Nilai-nilai tersebut tidak dapat begitu saja diambil dan dimasukkan di dalam aktivitas pendidikan anak-anak kita baik di sekolah, dalam keluarga, maupun di dalam masyarakat Indonesia. Unsur-unsur modernitas yang dibawa oleh proses globalisasi perlu diadaptasikan dengan kebutuhan lokal, budaya lokal yang dimiliki oleh komunitas Indonesia yang pluralistik. Selanjutnya nilai-nilai global yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita yang berubah perlu diadopsi secara alamiah sehingga tidak menimbulkan resistensi di dalam masyarakat kita sendiri.

¹⁴ Stromquist & Monkman, op cit, hlm 11-12.

¹⁵ Konsep dan istilah modal sosial ternyata pertama-tama lahir dalam dunia pendidikan oleh L.J. Henifan ketika ia menunjukkan peranan "community school" dalam menggalang kesatuan dalam masyarakat West Virginia (1913). Lihat tulisan Robert D. Putnam, "Community-Based Social Capital and Educational Performance," dalam Ravitch & Viteritti, *Making Good Citizens*, hlm. 58-95.

A. Pendidikan Perlu Adaptasi Nilai-nilai Global

Masa depan yang dibawa oleh proses globalisasi adalah masyarakat yang berdasarkan ilmu pengetahuan (*knowledge-based society*). Masyarakat masa depan tersebut adalah masyarakat yang berubah dan didasarkan kepada penemuan-penemuan yang meningkatkan taraf hidup manusia. Sikap inovatif merupakan syarat yang perlu dikembangkan dalam pendidikan modern. Dengan demikian kegiatan belajar-mengajar dalam lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun informal diarahkan kepada sikap inovatif, sikap meneliti, sikap yang meragukan akan penemuan-penemuan hari ini dan mengikhtiarkan penemuan-penemuan yang lebih baik. Rasa tidak puas terhadap apa yang telah dicapai merupakan ciri dari suatu "*knowledge-based society*." Hal ini berarti pribadi-pribadi yang inovatif, yang bekerja keras, yang ingin mencari kebenaran obyektif melalui data-data secara eksperimental merupakan syarat utama dalam lembaga-lembaga pendidikan. Sikap inovatif memerlukan *time management* di dalam bekerja, kualitas yang terkontrol di dalam pekerjaan serta sikap keterbukaan untuk mencari yang lebih baik. Suatu "*knowledge-based society*" adalah suatu masyarakat komunikatif. Oleh sebab itu penguasaan terhadap bahasa dunia (bahasa Inggris) serta bahasa komputer merupakan syarat mutlak di dalam kemajuan suatu masyarakat. Selain itu ilmu pengetahuan sosial merupakan hal mutlak di dalam komunikasi antar manusia yang diikuti pula oleh moralitas yang mengatur kelanggengan suatu komunitas.

Apakah di dalam melaksanakan pendidikan modern seperti diuraikan di atas terdapat suatu model global atau model universal? Tentunya tidak.¹⁶ Setiap komunitas mempunyai pilihannya sendiri sesuai dengan kebutuhan atau di dalam hal ini kita harus awas terhadap apa yang disebut imperialisme kebudayaan seperti yang telah dijelaskan di muka. Demikian pula kita memegang paradigma yang mengatakan bahwa terjadi hibridisasi dari unsur-unsur luar dengan kebudayaan lokal. Sudah tentu di dalam proses hibridisasi kebudayaan ini, kita jangan kehilangan identitas kita sendiri. Seperti yang kita lihat di dalam penyerapan nilai-nilai modern pada masyarakat Jepang dalam era Meiji, demikian pula apa yang terjadi dewasa ini di dalam kebudayaan Cina yang bahkan sedang membanjiri pasar global dengan produk-produk industrinya, makanan Cina, dan sekarang mengenai budaya Cina seperti pengobatan tradisional Cina, bahasa Mandarin¹⁷ dan sebagainya. Bahkan setiap kebudayaan yang dimiliki oleh komunitas manusia mempunyai hak yang sama untuk disebarluaskan di dalam era globalisasi dewasa ini.

B. Adopsi Nilai-nilai Universal Dalam Pendidikan Nasional

Pertanyaan yang menggelitik di dalam era globalisasi ialah apakah masih ada nilai-nilai universal di dalam kehidupan umat manusia? Jawaban terhadap pertanyaan ini ialah tentunya terdapat nilai-nilai universal karena kita semua adalah satu ialah umat manusia. Sebagai umat manusia tentunya mempunyai kesamaan

¹⁶ Lihat Berger & Huntington, *op cit*.

¹⁷ Menurut penelitian para pakar bahasa, pada tahun 2100 dari 6000 bahasa di dunia 90% akan hilang dimakan oleh bahasa "predator" seperti bahasa Cina, Inggris, Hindi, Swahili. Lihat tulisan Daniel S. Comiskey, "Last Worlds" dalam *Indiana Alumni Magazine*, March-April 2005."

dalam arti bahwa umat manusia berbeda dengan binatang. Dia adalah makhluk yang mempunyai rasio dan mempunyai pertimbangan-pertimbangan moral. Di dalam kebebasannya dia dapat bergaul dan berkomunikasi dengan sesamanya. Disinilah kemungkinan terdapatnya nilai-nilai universal di dalam kehidupan bersama umat manusia. *Universal Declaration of Human Rights* dari PBB pada tahun 1948 menunjukkan adanya pengakuan nilai-nilai universal tersebut.

Knowledge-based Society, Kecerdasan Manusia, UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003

Dalam memasuki *knowledge-based economy* diperlukan kemampuan untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan. Di dalam hal ini diperlukan kemampuan inteligensi manusia untuk menggunakan akal-budinya di dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan yang baru yang dibawa oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Di dalam Pembukaan UUD 1945, para *founding fathers* kita dengan sangat jeli mengatakan bahwa salah satu tujuan kita untuk membentuk Republik Indonesia ialah untuk mencerdaskan kehidupan rakyatnya. Sayang sekali di dalam upaya untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan tersebut, proses untuk mencerdaskan rakyat yaitu melalui pendidikan nasional tidak ditata sebagaimana seharusnya. Coba kita lihat perumusan tujuan pendidikan nasional yang tercantum di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Marilah kita simak bunyi Pasal 3 mengenai tujuan pendidikan nasional sebagai berikut:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Coba bandingkan dengan rumusan mengenai tujuan pendidikan nasional seperti yang dirumuskan di dalam UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yang tercantum dalam Pasal 3, sebagai berikut:

“Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.”

Terdapat perbedaan yang jelas antara kedua rumusan tersebut. Di dalam rumusan UU No. 20 Tahun 2003 terasa kurang jelas maksud tujuan pendidikan nasional karena tidak menyinggung-nyinggung secara eksplisit mengenai kecerdasan manusia Indonesia sebagaimana yang diminta oleh UUD 1945. Memang di sini terdapat suatu kekaburan mengenai tujuan pendidikan karena tidak jelas benar apa

yang dimaksudkan dengan pengajaran yang diberikan di sekolah (pendidikan formal). Pendidikan agama merupakan pendidikan yang mencakup keseluruhan hidup manusia sehingga terutama merupakan tanggung jawab keluarga serta masyarakat pada umumnya, sedangkan pendidikan di sekolah (pendidikan formal) terutama untuk membentuk kecerdasan manusia. Tentunya kecerdasan manusia itu bertumpu kepada pertimbangan kesusilaan sebagai ciri hakekat manusia. Di sini terasa keunggulan dari rumusan tujuan pendidikan nasional (pendidikan formal) dalam UU No. 4 Tahun 1950 ialah membentuk manusia susila yang cakap. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dapat menggunakan akal-budinya (*multiple-intelligence*) di dalam menghadapi kehidupannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral.¹⁸ Inilah arti manusia susila yang cakap. Dapat saja kita membentuk manusia susila tetapi tidak cakap oleh sebab itu pertimbangan-pertimbangan yang diambilnya mungkin saja berdasarkan emosi yang tidak terkontrol, atau kekurangan toleransi sehingga hanya dapat membenarkan kebenaran yang dianutnya sendiri. Etika fundamentalisme seperti yang dijelaskan di muka bukanlah menjadi milik seorang yang cerdas dan susila. Di dalam pembentukan manusia Indonesia yang cerdas, Tilaar merumuskannya sebagai manusia yang dapat mengambil keputusan yang inteligen demi untuk kemaslahatan pribadi dan sebagai anggota dari masyarakat Indonesia.¹⁹

Dalam era globalisasi yang menuju kepada *knowledge-based society*, Indonesia perlu mempersiapkan warganegaranya sebagai manusia-manusia yang cerdas sehingga dapat menempatkan diri di dalam pergaulan bangsa-bangsa. Di dalam kondisi kehidupan yang persaingan antar-bangsa, manusia Indonesia perlu dipersiapkan sebagai anggota masyarakat Indonesia yang cerdas. Pertama-tama dia harus dapat membangun masyarakat dan bangsanya sendiri yang di dalam kenyataannya memiliki pluralitas budaya. Diperlukan kecerdasan untuk menata kehidupan yang plural (*bhinneka*) tersebut agar sebagai komunitas manusia dalam negara-bangsa Indonesia dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Di dalam kaitan ini konsep negara-bangsa Indonesia perlu didefinisikan kembali agar sesuai dengan perubahan-perubahan global dewasa ini. Di dalam kaitan ini diperlukan suatu politik kebudayaan Indonesia karena seperti yang telah dijelaskan pendidikan nasional tidak terjadi di dalam ruangan yang kosong tetapi di dalam lingkungan budaya Indonesia yang *bhinneka*.

¹⁸ Lihat ucapan mengenai "Manusia Indonesia Cerdas," dalam H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme*, op cit, hlm 190-214.

¹⁹ Salah satu tantangan transformasi pendidikan Indonesia untuk menjaga dan mengembangkan sikap multikulturalis. Lihat H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan* (2003), Pasal 9, "Etika Pendidikan Nasional," hlm. 213-225

Referensi

Bauman, Zygmunt. 2003. *Community. Seeking Safety in an Insecure World*. Blackwell Publishing & Polity Press, Cambridge.

Berger, Peter L. & Samuel P. Huntington (editors). 2003. *Many Globalizations. Cul-tural Diversity in the Contemporary World*. Oxford University Press, New York.

Jameson, Fredric & Masao Miyoshi (editors). 2003. *The Cultures of Globalization*. Duke University Press.

Ravitch, Diane & Joseph P. Viteritti (editors). 2001. *Making Good Citizens, Education and Civil Society*. Yale University Press, New Haven.

Stromquist, Nelly P. & Karen Monkman (editors). 2000. *Globalization and Education*. Rowman & Littlefield, Lanham.

Tilaar, H.A.R. 2004. *Multikulturalisme. Tantangan-tantangan Global dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Grasindo, Jakarta.

Tilaar, H.A.R. 2003, *Kekuasaan dan Pendidikan. Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, Grasindo, Jakarta.

